

## ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

Keri Saroh Isti'anah<sup>1\*</sup>, Ari Nurul Fatimah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tidar, Magelang

E-mail: <sup>1)</sup> [kerisarah@students.untidar.ac.id](mailto:kerisarah@students.untidar.ac.id)

### Abstract

*The COVID-19 pandemic is an outbreak of an infectious disease originating from the SARS-Cov-2 virus. As the virus grows, it causes various problems in various areas of life in society. The impact felt was so real with the cases of high death rates, unstable economy and other problems. The government, which has an obligation to make people's welfare take various policies to overcome this problem. From policy making, surely, it intersects with state finances which will ultimately affect the financial performance of the government itself. The purpose of this research is to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the financial performance of local governments. The method used in writing this article is a qualitative method in the form of a literature review. The data obtained comes from secondary data, namely in the form of indirect retrieval via Google Scholar, Sinta and several articles that support the concept of the theme ranging from 2017-2022. The results of this study show that there have been changes in Indonesia's economic quarter and the regional budget experienced a minus number. Even so, the influence of the Covid-19 pandemic did not have a significant impact on the financial performance of local governments in several regions in Indonesia.*

*Keywords: Covid-19 Pandemic, Financial Performance, Regional Finance*

### Abstrak

Pandemi covid-19 adalah sebuah wabah penyakit menular berasal dari virus SARS-Cov-2. Seiring tumbuh kembangnya virus ini menyebabkan berbagai masalah di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dampak yang dirasakan terasa begitu nyata dengan adanya kasus angka kematian yang tinggi, ekonomi tidak stabil dan masalah lain-lain. Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk membuat kesejahteraan masyarakat mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dari pengambilan kebijakan tentunya bersinggungan dengan keuangan negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan itu sendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif berupa literatur review. Data yang didapatkan berasal dari data sekunder yaitu berupa pengambilan secara tidak langsung melalui Google Scholar, Sinta dan beberapa artikel yang mendukung konsep temanya memiliki rentang dari 2017-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kuartal ekonomi Indonesia serta APBD mengalami angka minus. Walaupun demikian, pengaruh pandemi covid-19 tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di beberapa daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, Pandemi Covid-19

## **1. PENDAHULUAN**

Pandemi covid-19 adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2. Penyakit jenis ini dikenali dengan gejala umum berupa batuk, demam, kelelahan dan kehilangan rasa atau bau. Wabah ini muncul pada akhir tahun 2019 di China tepatnya di Pasar Wuhan namun. Seiring perkembangannya wabah ini disebut sebagai penyakit serius oleh WHO setelah Kepala Komisi Kesehatan Nasional China Zhong Nanshan mengatakan bahwa penyakit ini bisa menularkan antarmanusia dimana tidak ditemukannya obat atau vaksin disertai angka kematian yang terus bertambah. Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO tersebut, beberapa negara menerapkan lockdown akibat dampak darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Setelah banyak kasus pandemi covid-19 yang telah menyebar di beberapa negara, virus ini pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua orang yang tertular dari seorang warga negara Jepang.

Perkembangan penyakit ini mulai menyebar dan menimbulkan angka kematian yang terus bertambah membuat pemerintah turun tangan. Peran Pemerintah pemerintah Indonesia berupa pengambilan tindakan pencegahan dengan menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mulai level 1 sampai level 4. Kebijakan tersebut diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2021 yang menyampaikan bahwa PPKM adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari guna menekan laju penularan covid-19 serta mengendalikannya kapasitas rumah sakit (Moegiarso, 2021). Namun, dalam penerapannya PPKM tersebut menimbulkan konflik dimasyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan untuk hidup. Hal tersebut dikarenakan perekonomian yang tidak bisa berjalan sempurna karena adanya pembatasan sehingga masyarakat dirasa kesulitan untuk melakukan transaksi perekonomian. Hal ini didukung oleh banyaknya perusahaan yang gulung tikar, karyawan banyak yang diPHK, serta angka kemiskinan yang semakin bertambah.

Pemerintah menanggapi dampak negatif dari kebijakan yang dikeluarkannya sehingga pemerintah memberikan keringanan berupa penyaluran dana bantuan sosial yang bermacam-macam. Pemerintah yang telah berjasa untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus covid-19 serta menangani pemulihan ekonomi juga berimbas pada dampak baik positif maupun negatif. Secara positif pandemi memiliki dampak terjalannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam penanganan pemberian kebijakan tidak terlepas oleh anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bencana biologis seperti pandemi covid-19 tidak sengaja terjadi sehingga dalam anggaran yang direncanakan oleh pemerintahanpun mengalami dampak. Dampak negatif pandemi memiliki dampak terhadap faktor ekonomi makro Indonesia mengalami penurunan seperti yang tercatat di Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen years on your melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang memiliki angka sebesar 5,07 persen (BPS, 2020).

Menanggapi terjadinya penurunan dalam segala aspek, dampak ini juga berimbas pada penurunan kinerja keuangan daerah misalnya pada aspek Pendapat Asli Daerah (PAD) contohnya di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat di tahun 2020. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Klimanov et al. (2021) di Rusia menjelaskan bahwa pada kuartal pertama tidak memiliki dampak yang buruk antara hubungan Pengaruh APBD dengan pandemi Covid-19, namun dampaknya baru dirasakan ketika memasuki kuartal II. Penelitian lain seperti Putra (2020), terjadi penurunan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan diantaranya 78% BLU Kesehatan, 46% BLU Pendidikan dan 47% BLU Lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti melakukan review artikel guna mendalami lebih jauh mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Pandemi Covid-19**

Corona virus disease 2019 merupakan suatu penyakit yang ditimbulkan oleh adanya virus SARS-Cov-2 yang memiliki gejala seperti flu biasa. Menurut laporan World Health Organization (2020) yang dikutip oleh Alamsyah (2020), gejala utama penyakit covid-19 pada pasien China adalah berupa demam (87,9%), batuk kering (67,7%), dan rasa lelah (38,1%) sedangkan gejala sesak nafas (18,6%), dan radang tenggorokan (13,9%) memiliki sifat minoritas. Menurut beberapa penelitian Setia (2022); Wahyu Mustika (2022), pasien covid-19 yang memiliki penyakit bawaan yaitu berupa penyakit dalam misal jantung coroner, diabetes melitus, hipertensi dan penyakit sejenis rentan terkena virus ini. Virus covid-19 ditemukan pertama kali di temukan pada tahun 2019. Asal mula terjadinya penyakit ini yaitu terjadinya kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada tanggal 12 Desember 2019 di Wuhan, China yang terjadi pada pedagang pasar ikan Huanan yang berjualan hewan ternak maupun hewan liar. Pneumonia dikenal sebagai paru-paru basah berupa infeksi peradangan pada kantong udara dari semua atau salah satu paru-paru.

Peran pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif adanya covid-19 berupa langkah pertama antisipasi penularan virus corona dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan negara berupa pemblokiran pendatang yang datang dari luar negeri baik itu jalur laut, udara, darat. Namun, hal tersebut bisa dimasuki jika pendatang merupakan tokoh penting, tidak dari negara yang memiliki kasus covid-19 yang tinggi atau yang telah melakukan karantina dan terverifikasi seperti vaksin lengkap, hasil pcr dinyatakan negatif covid-19. Langkah kedua memprogramkan berbagai jenis vaksin mulai dari vaksin 1, vaksin 2, hingga booster yang dibeli dari luar negeri misalnya vaksin sinovac, astrazanece, pfizer dll. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kekebalan imun atau daya tahan dari tubuh masyarakat sendiri. Langkah ketiga melakukan program PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) mulai dari level 1 sampai level 4 sesuai dengan peningkatan jumlah kasus di daerahnya. Langkah keempat berupa pendistribusian program bantuan sosial terhadap pihak-pihak yang terkena dampak akibat dari adanya pandemi covid-19. Hal ini didukung dengan penyaluran program bantuan sosial berupa penyediaan pangan, keringanan pembayaran listrik, air sampai pemberian bantuan para pelaku UMKM.

### **2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.2.1. Kinerja Keuangan**

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja sebagai luaran kegiatan ataupun program pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran menggunakan indikator terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurut Holung et al. (2021), kinerja keuangan merupakan capaian dari kebijakan yang telah direncanakan selama periode tertentu dengan indikator keuangan tertentu. Kinerja keuangan diukur dengan melihat

efisiensi realisasi alokasi anggaran pemerintah dan jika sudah menjadi hasil, pemerintah daerah melaporkan realisasi tersebut dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.

### **2.2.2. Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005, mendefinisikan keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan daerah. Penggunaan keuangan daerah harus memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi, kejujuran, value for money (ekonomi, efektivitas, dan efisiensi), serta pengendalian.

## **2.3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

### **2.3.1. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat**

Tingkat ketergantungan ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan biaya pengeluaran daerah. Setelah dana yang telah diberikan, pemerintah pusat akan melakukan pengawasan terhadap dana ini untuk mengoptimalkan penggunaan dana ini sesuai dengan kenyataan serta untuk menghindari adanya tindak penyelewengan dari oknum yang memiliki motif mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok.

### **2.3.1. Tingkat kekayaan daerah**

Menurut Defitri et al. (2021), tingkat kekayaan daerah merupakan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Hal ini tercermin dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai tolak ukur terhadap peningkatan kekayaan daerah. Semakin tinggi peningkatan PAD semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi tingkat kemandirian terhadap pemerintah pusat.

### **2.3.2. Belanja modal**

Menurut Eksandy et al. (2019), belanja modal merupakan belanja pemerintah yang memiliki kebermanfaatan lebih dari satu periode. Belanja modal dapat berupa pengadaan barang aset daerah contohnya pembangunan infrastruktur di daerahnya yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah harus dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tujuannya bisa tercermin dari pemerintah yang memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dari bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan lain-lain.

### **2.3.3. Pengukuran kinerja keuangan daerah**

Menurut Westin (1998) dalam Alpi & Ramadhan (2018), pengukuran kinerja adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dalam pelaporan capaian, kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Menurut Jusuf (2013), Pengukuran

kinerja ini bertujuan untuk menjadi umpan balik sehingga akan terjadi adanya upaya perbaikan secara terus menerus di masa depan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dinilai dengan total aset pemerintah daerah. Total aset ini menunjukkan sumber daya yang memiliki potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan bentuk akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Mandel (1997) dalam Estalia et al. (2022) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berimbas pada peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio APBD. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan dari APBD menurut Amal & Wibowo (2022) antara lain :

- 1) Rasio kemandirian
- 2) Rasio efektivitas
- 3) Rasio efisiensi
- 4) Rasio aktivitas
- 5) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
- 6) Rasio pertumbuhan

#### **2.3.4. Size**

Menurut Naopal et al. (2017), *size* adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka ekspektasi dari publik akan semakin besar berupa kontribusi pemerintah daerahnya untuk dapat memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat umum. Dalam hal ini tuntutan akan kinerja dari pemerintah secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

#### **2.3.5. Leverage**

Menurut Novari & Lestari (2016), *levergae* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. Sedangkan hal ini diperjelas bahwa leverage mengungkapkan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah kepada pihak eksternal dibandingkan dengan kepemilikan modal sendiri.

### **2.4. Penelitian Terdahulu**

#### **2.4.1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia)**

Menurut artikel berasal dari Rahmawati & Kiswara (2022). Hasil kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti tersebut terjadi perbedaan signifikan sebelum dan semasa Covid-19 mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang terdapat pada rasio efektivitas, rasio PAD, rasio kontribusi kemandirian keuangan daerah, serta rasio belanja modal. Sedangkan, rasio derajat fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi perbedaan jumlah yang signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah sebelum maupun selama Covid-19.

#### **2.4.2. Dampak Pandemi covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)**

Menurut artikel berasal dari Onibala et al. (2021). Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi pada tahun 2020 bahwa telah terjadi penurunan terhadap rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, serta rasio keserasian. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD berada dalam kategori efektif. Namun, untuk kinerja keuangan di masa pandemi covid-19 dengan kinerja tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan yang signifikan.

#### **2.4.3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19**

Menurut artikel yang berasal dari Sitepu et al. (2022). Hasil kesimpulan yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara memiliki rasio kemandirian yang baik mampu tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat walau sedang berada di krisis pandemi Covid-19. Namun, hal yang positif tersebut masih ada kekurangan yaitu berupa penurunan pendapatan yang mencapai angka minus pada rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -1,24%. Hal ini diakibatkan oleh pemerintah yang memberikan instruksi untuk menerapkan Work From Home (WFH) yang mengakibatkan terhambatnya jalan kinerjanya serta kurang memadainya perlengkapan untuk bekerja atau alasan lain kurang membiasakan diri untuk berinteraksi dari jauh.

#### **2.4.4. Analisis Kinerja Keuangan APBDes saat Pandemi di Desa Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu**

Menurut artikel yang berasal dari Mentari et al. (2022). Hasil kesimpulan yang diperoleh dari keadaan secara umum menunjukkan tingkat efisien dengan perolehan angka 90,4% pada pengelolaan APBDes selama pandemi. Rasio efektivitas memiliki perolehan 60% yang berarti cukup efektif hal ini dikarenakan kurangnya sistem informasi yang tidak diperbaharui. Sedangkan, untuk rasio kemandirian dengan pemerintah pusat mencapai angka 82,81% angka yang cukup tinggi membuktikan bahwa Desa Gumuk Rejo memiliki angka ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat.

#### **2.4.5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Masa Pandemi Covid-19**

Menurut artikel yang berasal dari Ariadi & Jatmika (2021). Hasil kesimpulan yang diperoleh yaitu kinerja keuangan pemerintah Provinsi Papua dari data 2018-2020 berdasarkan rasio desentralisasi fiskal mendapatkan nilai yang sangat kurang yaitu hanya berkisar 0,0 hingga 08,011. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan tingkat kemandirian sedang angka yang didapat berkisar 21,28 – 25,21 yang memiliki makna bahwa pemerintah Provinsi Papua masih cukup mampu untuk tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Untuk leverage atau kemampuan belanja rutin pada proporsi kemampuan PAD masih dibawah 20% di tahun 2018 dari total belanja dan total anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua. Namun, angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 walaupun tahun ini adalah awal kemunculan pandemi covid-19 mencapai kisaran 41%.

#### **2.4.6. Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram di Masa Pandemi Covid-19**

Menurut atikel yang berasal dari Safitri & Sasanti (2022). Hasil kesimpulan yang diperoleh yaitu dilihat dari rasio kemandirian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 pemerintah Kota Mataram memiliki nilai berkisar 25-50% yang masih tergolong rendah. Rasio desentralisasi fiskal tidak mengalami perubahan dengan tahun lalu yang berada pada tingkat 26%. Rasio efektivitas mengalami penilaian yang sangat bagus berada pada posisi 109% di tahun 2020. Rasio efisiensi mengalami penilaian yang sangat bagus di tahun 2020 yaitu berkisar 104%. Rasio pertumbuhan memiliki nilai cukup dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mendapatkan kisaran 25%.

#### **2.4.7. Dampak pandemi covid-19 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan**

Menurut artikel yang berasal dari Saifuddin & Abdullah (2022). Hasil kesimpulan yang diperoleh yaitu laporan keuangan pemerintah Kota Tidore tahun 2020, tidak berdampak pada masa pandemi covid-19. Hal ini diperkuat oleh adanya neraca tentang kewajiban pemerintah kota Tidore Kepulauan tidak memiliki kewajiban atas dampak penanganan pandemi covid-19. Belanja langsung pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga tetap membaik berkisar di 90% di refocussing untuk penanganan covid-19. Namun, hal lain terjadi pada ikhtisar pencapaian target keuangan tahun 2020 tidak tercapai dari penerimaan PAD.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif secara literatur review. Metode ini memiliki sifat menggambarkan serta menjabarkan hasil temuan yang ada di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung. Teknik pengambilan data dalam hal ini adalah dengan melakukan observasi dan dokumentasi berupa penelusuran pencarian berita dari berbagai media serta pencarian jurnal-jurnal yang memiliki pembahasan dalam lingkup Pandemi Covid-19 dengan keterkaitannya pada kinerja keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan tema artikel ini. Data yang diidentifikasi untuk dijadikan referensi adalah artikel diperoleh didapatkan dari Sinta maupun Google Scholar yang memiliki rentang waktu selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai tahun 2022 hal ini akan mendukung artikel yang dibahas akan menjadi relevan sesuai dengan kondisi terkini.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pandemi covid-19 adalah sebuah wabah penyakit berasal dari virus Sars-Cov yang dalam perkembangannya telah memiliki dampak meluas terhadap masyarakat. Virus ini dianggap sebagai penyakit yang berbahaya karena dalam penanganan pencegahan maupun pengobatannya telah menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh timbulnya penyakit yang tidak diketahui keberadaannya, masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan menurun serta angka kematian yang tinggi. Oleh karena hal tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan memiliki kewajiban dalam

membuat kesejahteraan di masyarakat. Peran pemerintah adalah memiliki tindakan pencegahan terhadap penyakit menular ini berupa penerapan PPKM. Selain itu, pemerintah menanggung kebutuhan biaya hidup di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan yang tinggi di masyarakat berupa penyaluran bantuan sosial pangan, listrik, air dan lain-lain.

Kebijakan yang ada di pemerintah tersebut, tidak terlepas dari anggaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Namun, karena virus ini memiliki sifat secara mendadak sehingga tidak tercatat dalam penganggaran menimbulkan dampak terhadap kinerja keuangan daerah. Walaupun, dalam prakteknya pemerintah masih bisa untuk menunda kebutuhan seperti belanja kebutuhan daerah dan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi covid-19 ini tetap memiliki dampak. Dampak yang dirasakan seperti yang tercatat dalam BPS bahwa ekonomi makro Indonesia mengalami penurunan seperti yang tercatat di Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen years on your melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang memiliki angka sebesar 5,07 persen.

Menanggapi berbagai kejadian trending kasus penurunan yang tidak hanya terjadi di BPS namun kasus serupa terjadi di beberapa Pemerintah Daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat pada tahun pertama masuknya covid-19 Pendapatan Asli Daerahnya mengalami penurunan. Dalam hal ini, uji kemampuan peran pemerintah daerah dalam menangani pandemi covid-19 diandalkan pemerintah daerah masih mampu dan bertahan dimasa pandemi. Ini terbukti walaupun dalam masa krisis, beberapa daerah seperti yang terlihat di penelitian terdahulu pandemi covid-19 tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah seperti penelitian 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Fitri Rahmawati dan Endang Kiswara. Dalam penerapannya Pemerintah Daerah memiliki ketidaksempurnaan dengan adanya sebelum pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid.

Ketidaksempurnaan ini berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang menginstruksikan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kebijakan Work Form Home (WFH). Kebijakan tersebut bagus untuk pencegahan penularan virus covid-19, namun tidak bagus untuk pemerintah daerah yang memiliki kendala. Hal ini terjadi karena tidak terbiasanya berinteraksi dari jauh serta kurangnya perlengkapan yang memadai untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pendapatannya ada di dalam pariwisata memiliki penurunan karena kebijakan pemerintah untuk menutup kegiatan pariwisata seperti daerah Jawa Barat, DKI Jakarta tersebut. Walaupun demikian, beberapa pemerintah daerah yang diukur dari rasio kemandirian daerah yang diukur dari nilai PAD terhadap dana transfer pemerintah beberapa pemerintah daerah seperti Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara masih tergolong tinggi dan mandiri dari Pemerintah Pusat.

## **5. KESIMPULAN**

Pandemi covid-19 adalah sebuah wabah penyakit menular dimana setiap kegiatan masyarakat dibatasi. Oleh karenanya dikeluarkan sebuah kebijakan dari pemerintah berupa pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM). Dari kebijakan ini muncullah trending sistem kerja yang baru yang disebut work from home (bekerja dari rumah). Pada kondisi yang sulit di pandemi covid-19 terdapat beberapa data bahwa pertumbuhan ekonomi

Indonesia mengalami kemunduran. Hal buruk yang dikhawatirkan oleh berita bersumber dari BPS bahwa telah melemahnya perekonomian secara makro tersebut dijadikan analisis keterkaitannya terhadap kinerja keuangan, salah satunya kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui pemerintah daerah yang diberikan misi untuk melakukan wewenang untuk mengelola keuangan demi membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini masih tercermin pada hasil yang didapat dari beberapa artikel yang peneliti lakukan analisis bersumber dari artikel yang melakukan penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif dari data sekunder maupun wawancara secara langsung pemerintah daerah masih mampu dalam melaksanakan misi tersebut. Hasil yang didapat ternyata pandemi covid-19 tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah walaupun ada terdapat adanya ketidaksempurnaan yaitu adanya perbedaan sejak memasuki masa pandemi covid-19 beberapa aspek rasio kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, F. (2020). Covid-19: penyebab, penyebaran dan pencegahannya. *Indonesian Scholars Network*.
- Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 103–114.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15.
- BPS. (2020). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ekonomia*, 11(1), 10–19.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & EKAWATI, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 85–94.
- Estalia, E., Rifa'i, M. N., & Rahmadani, R. (2022). Kinerja Kepemimpinan Lembaga Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja. *JECO: Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship*, 1(1), 6–15.
- Holung, R. L., Kawung, G. M. V, & Tumangkeng, S. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Jusuf, R. S. (2013). Analisis pengaruh TQM, Sistem pengukuran kinerja dan reward terhadap

- kinerja manajerial. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Klimanov, V., Kazakova, S., Mikhaylova, A., & Safina, A. (2021). Fiscal resilience of Russia's regions in the face of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(1), 87–94.
- Mentari, B. N. N. E., Sinaga, I., & Akadiati, V. A. P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan APBDes Saat Pandemi. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 34–52.
- Moegiarso, S. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Menembus Zona Ekspansif. *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta: Ekon. Go. Id.*
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karaktersitik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56–68.
- Novari, P. M., & Lestari, P. V. (2016). *Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate*. Udayana University.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Putra, D. M. (2020). Dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan dan kinerja layanan badan layanan umum di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 51–67.
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2).
- Safitri, H., & Sasanti, E. E. (2022). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(1), 1–15.
- Saifuddin, A., & Abdullah, M. (2022). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 66–72.
- Setia, V. (2022). *Hubungan Olfactory Dysfunction Dengan Derajat Keparahan Penyakit Pasien Covid-19 Di Risa Semarang (Studi Analitik Observasional pada Pasien Rawat Inap COVID-19 di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sitepu, Y. L. B., Munawarah, M., & Simatupang, N. L. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(1), 1–8.
- Wahyu Mustika, D. W. (2022). *Korelasi Antara Diabetes Tipe 2 Dengan Kejadian Covid-19 Studi Observasional pada Pasien Rawat Inap di Ruang Isolasi RS Islam Sultan Agung Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung.

## **Copyrights**

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).